

## GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
MIGAS	MEDIA INDONESIA	5	29-08-2002

# BISNIS ELPIJI PERTAMINA DIPERSIMPANGAN JALAN

## Siap Bersaing Dipasar Bebas

SEORANG ibu rumah-tangga yang hendak membeli gas elpiji tampak bertanya-tanya, lantaran harga gas elpiji yang ditawarkan pemilik warung telah naik dari Rp25.200 menjadi Rp28.800 per tabung 12 kilogram. Sang ibu memaklumi, sambil menanyakan apakah pelayanannya juga ditingkatkan. Si pemilik warung dengan sabar menjelaskan kenaikan harga gas elpiji itu telah menjadi keputusan Pertamina sejak 6 Juli 2002, dan akan diikuti dengan peningkatan pelayanan. Mendengar alasan kenaikan itu si ibu rumah tangga hanya tersenyum sambil membawa pulang tabung gas elpiji yang baru dibelinya.

**M**emang sejak diterbitkannya surat keputusan Dirut Pertamina No. Kpts-084/C00000/2002-S3, Pertamina telah menaikkan harga jual *liquid petroleum gas* (LPG) atau biasa dikenal masyarakat sebagai gas elpiji untuk keperluan rumah tangga dan industri.

Pertamina sendiri memiliki alasan yang kuat untuk menaikkan harga gas elpiji, yaitu sebagai rangkaian upaya Pertamina untuk mengurangi kerugian di bisnis elpiji. Bayangkan saja, kerugian yang diderita BUMN migas di bisnis ini selama periode 2001 mencapai Rp900 miliar. Padahal, pemerintah sebagai pemegang saham Pertamina tidak menganggarkan subsidi terhadap komoditas elpiji.

Sejak pertama kali elpiji diperkenalkan Pertamina kepada masyarakat Indonesia pada era 1970-an, elpiji memang tidak dikelompokkan sebagai bahan bakar minyak (BBM). Ini berbeda dengan BBM seperti solar, bensin, minyak tanah maupun minyak bakar yang memang mendapat anggaran subsidi dari pemerintah. Karena itu wajar, jika elpiji tidak mendapat jatah subsidi pemerintah, apalagi konsumen elpiji masuk dalam golongan ekonomi menengah ke atas yang memang memiliki daya beli lebih tinggi.

Pilihan yang pahit bagi Pertamina menaikkan harga gas elpiji, namun itu harus dilakukan mengingat kerugian yang mencapai Rp900 miliar setiap tahun harus ditanggung Pertamina sejak terjadi krisis moneter di negeri ini. Kerugian ini terlihat dari perkembangan harga elpiji. Jika pada akhir tahun 1996 harga gas elpiji sebesar US\$430 per ton. Dengan kurs rata-rata sebesar Rp2.300 per satu dolar AS pada masa itu, Pertamina menjual gas elpiji ditingkat konsumen hanya Rp1.000 per kilogram atau Rp12.000 per satu tabung 12 kilogram. Padahal biaya pokok produksi (BPP) Pertamina saat itu hanya sekitar US\$140 per ton. Dengan demikian bisnis elpiji yang dijalankan Pertamina saat itu cukup menguntungkan.

Tetapi keuntungan itu tidak berlangsung lama seiring terjadinya depresiasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing saat terjadi krisis moneter. Dengan kurs rupiah yang berlaku saat ini sangat tidak mungkin bagi Pertamina untuk mempertahankan harga elpiji, apalagi BPP elpiji Pertamina juga mengalami peningkatan menjadi sekitar US\$227 per ton.

Karena itu, tidak ada jalan lain bagi Pertamina kecuali melakukan penyesuaian harga elpiji untuk mendekati BPP elpiji Pertamina. Meski begitu, Pertamina menyadari kenaikan secara langsung mendekati BPP elpiji akan membebani masyarakat yang saat ini masih berhadapan dengan krisis ekonomi.

### Pola bisnis Pertamina

Faktor penting lainnya yang mendorong Pertamina untuk menyesuaikan harga elpiji pada nilai keekonomiannya adalah keberadaan Undang-Undang Migas No. 22 tahun 2001 yang memungkinkan masuknya pemain baru di bisnis migas. Selain itu, disiapkannya PP bagi Pertamina untuk menjadi Persero, membuat Pertamina harus merubah orientasi bisnisnya.



■ Wiharto  
GM LPG & Produk Khusus Pertamina

"Kami sadar sepenuhnya bahwa masyarakat masih menghadapi krisis, begitupula Pertamina yang terpaksa harus menaikkan harga elpiji. Pilihan pahit ini harus kita pahami sebagai tugas proses menuju kondisi yang lebih baik," tegas General Manajer LPG & Produk Khusus Pertamina, Wiharto meyakinkan masyarakat.

Menurut Bapak Wiharto, keberadaan dua undang-undang tersebut akan membuat Pertamina sebagai perusahaan migas kelas dunia yang mampu mencetak keuntungan. Meski begitu, masyarakat tidak perlu khawatir karena perusahaan milik negara ini tetap akan mengemban misi khusus sesuai tugas yang diamanatkan pemerintah, seperti penyediaan BBM minyak tanah hasil subsidi bagi masyarakat yang berhak.

"Keberadaan UU Migas No. 22/2001 dan PP bagi Pertamina yang saat ini masih dibahas itu akan membuat Pertamina merubah pola bisnisnya menjadi perusahaan yang mencetak keuntungan bukan

kerugian seperti yang dialami di bisnis elpiji," ujar pria kelahiran Solo 53 tahun yang lalu.

Suka tidak suka, Pertamina harus siap bersaing secara sehat dengan sesama perusahaan migas dunia, apalagi dengan UU Migas yang baru para pemain asing dibebaskan menjalankan bisnisnya di Indonesia, termasuk menjual elpiji. Ibarat pisau bermata dua. Satu sisi harus mencari keuntungan tapi sisi lain harus memahami keterbatasan daya beli konsumen.

Menyadari posisi sulit itu, Pertamina memilih cara menaikkan harga gas elpiji secara bertahap hingga mencapai BPP elpiji sebesar Rp3.000 per kilogram pada akhir 2003. Untuk tahap pertama yang berlaku sejak 6 Juli 2002, Pertamina telah menaikkan harga gas elpiji sebesar Rp300 per kilogram, yaitu dari Rp2.100 per kilogram menjadi Rp2.400 per kilogram. "Dari kenaikan Rp300 per kilo ini saja Pertamina diharapkan bisa menekan kerugian tahun ini menjadi hanya Rp700 miliar dari Rp900 miliar yang selama ini," tandas Wiharto. "Pengurangan kerugian dengan penyesuaian harga ini memang dilakukan bertahap dan transparan karena kami sangat memahami kondisi di masyarakat yang beragam dalam memandang kenaikan harga gas elpiji."

Padahal, tambahnya, Pertamina bisa saja menutup mata dengan langsung menaikkan harga gas elpiji sesuai BPP elpiji Pertamina. Namun itu tidak dilakukan karena Pertamina juga sedang melakukan pembenahan secara internal untuk menjadi perusahaan migas yang sehat dan berdaya saing. Rencananya, setiap tahap kenaikan harga

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

gas elpiji ini diperkirakan hanya 15% hingga 20% hingga mencapai harga Rp3.000 per kilogram.

Sarjana Teknik Kimia ini juga mengungkapkan meski harga elpiji produksi Pertamina dinaikan menjadi Rp3.000 per kilogram, masyarakat masih akan memperoleh harga yang relatif rendah ketimbang harga gas elpiji di negara tetangga. Vietnam, misalnya. Harga gas elpiji di negara yang pernah diduduki tentara AS itu mematok harga sebesar Rp5.300 per kilogram, bahkan Singapura memasang harga gas elpijinya hingga Rp10.147 per kilogram.

"Harga gas elpiji di luar negeri memang akan lebih mahal dari Pertamina sekalipun sudah disesuaikan dengan BPP elpiji Pertamina, karena negara-negara itu juga mengenakan pajak untuk elpiji," kata Bapak Wiharto.

Melihat kemampuan Pertamina itu, General Manager LPG & Produk Khusus Pertamina ini optimistis mampu bersaing dengan pemain-pemain asing yang saat ini sudah mengintip pasar gas elpiji di Indonesia. Apalagi, diproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi gas elpiji di masyarakat. Saat ini saja kebutuhan gas elpiji nasional berkisar 900 ribu ton hingga satu juta ton per tahun dan cenderung meningkat. Saat ini Pertamina sendiri baru memproduksi gas elpiji

di Indonesia. Apalagi, diproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi gas elpiji di masyarakat. Saat ini saja kebutuhan gas elpiji nasional berkisar 900 ribu ton hingga satu juta ton per tahun dan cenderung meningkat. Saat ini Pertamina sendiri baru memproduksi gas elpiji 'pressurized' untuk keperluan domestik sekitar 850.000 ton per tahun, sedangkan sisanya masih harus diimpor dengan harga internasional. Selain memasok untuk kebutuhan sendiri, Pertamina juga memproduksi gas elpiji 'refrigerated' sebesar satu juta ton setiap tahun untuk keperluan ekspor. "Yang kita ekspor itu memang jenis gas elpiji 'refrigerated' yang memiliki nilai ekonomis untuk mendatangkan devisa bagi negara," kata Bapak Wiharto.

### Peningkatan pelayanan

Memahami keputusan menaikkan harga gas elpiji tidak bisa dihindari, Pertamina sadar bahwa upaya yang harus dilakukan agar keputusan itu bisa diterima masyarakat adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dalam pemasaran gas elpiji.

Menurut Bapak Wiharto, peningkatan pelayanan ini bukan sekedar kompensasi penyesuaian harga gas elpiji namun juga dalam rangka mempersiapkan diri bersaing dalam perdagangan bebas. "Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan itu menjadi bagian dari strategi Pertamina untuk memenangkan persaingan," tegasnya.

Selama ini, Pertamina banyak menampung keluhan konsumen akibat buruknya mutu pelayanan dalam penjualan gas elpiji seperti isi gas elpiji tidak sesuai ukuran yang tertera dalam tabung, asesoris tabung tidak lengkap, bahkan agen penjualan gas elpiji seringkali melakukan penyelewengan dengan menaikkan harga diatas patokan yang ditetapkan Pertamina. Namun, saat ini konsumen telah diberi kebebasan untuk menkritisi pelayanan yang tidak sesuai diberikan Pertamina. Bapak Wiharto menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan konsumen sebelum membeli gas elpiji Pertamina, yaitu:

1. Berat gas elpiji harus 12 kilogram (diluar berat tabung gas).
2. Saluran tabung gas harus tertutup segel plastik.
3. Tabung gas dilengkapi *rubber seal* sebagai kelengkapan standar.
4. Minta bon pembelian tabung gas elpiji
5. Catat agen penjual gas elpiji

Jika konsumen tidak mendapat pelayanan standar Pertamina tersebut, General Manager LPG & Produk Khusus Pertamina menyarankan agar melakukan pengaduan melalui ke Unit Pemasaran Pertamina terdekat dengan menyertakan bukti dan identitas agen penjualan yang melakukan pelanggaran pelayanan standar yang ditetapkan Pertamina. Dalam waktu dekat, Pertamina akan mengaktifkan 'Call Centre' untuk menerima pengaduan masyarakat.

Bapak Wiharto berjanji akan menindak tegas agen-agen penjualan yang melakukan pelanggaran, seperti sanksi administrasi hingga pencabutan hak keagenannya. Seharusnya, penyelewengan gas elpiji yang ada tidak terjadi lagi karena Pertamina sudah memasukan keuntungan para agen dalam skema penyesuaian harga gas elpiji.

"Pertamina masih rugi, tapi agen sudah mendapat kenaikan margin ( dari Rp200 per kilogram menjadi Rp300 per kilogram). Jadi tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen," tegasnya. Pertamina sendiri akan melakukan standarisasi berat tabung gas elpiji untuk memudahkan pengisian gas elpiji agar sesuai dengan harga yang ditawarkan ke konsumen. Selain itu, BUMN migas ini juga akan meningkatkan fungsi pengawasan terhadap mitra usahanya, mulai dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) hingga agen penjual elpiji. Pengawasan ini juga melibatkan SPPBE dan Agen yang tergabung dalam wadah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).

Dengan dilibatkannya asosiasi pengusaha itu, Pertamina mengharapkan fungsi pengawasan bisa lebih efektif, apalagi Hiswana Migas sudah berkomitmen untuk menata kembali pelayanannya kepada masyarakat. "Masalah ini harus menjadi tanggung jawab bersama, karena tidak mungkin dibebankan kepada Pertamina saja mengingat usaha ini juga dinikmati swasta," tandas Bapak Wiharto. Masyarakat pun juga diminta partisipasinya untuk membantu dalam pengawasan terhadap bisnis gas elpiji tersebut, karena pada dasarnya harga gas elpiji yang dipatok Pertamina telah sesuai dengan tahapan pencapaian harga keekonomiannya. Harga jual gas elpiji itu berlaku untuk radius kurang atau dibawah 60 km dari instalansi utama yang ditunjuk Pertamina, sedangkan untuk radius diatas 60 km biaya tersebut akan ditambah biaya pengangkutan sesuai ketentuan dalam SK Menteri Perhubungan.

Masyarakat juga diharapkan bisa memahami penyesuaian bertahap harga jual gas elpiji yang akan dilakukan Pertamina. Karena bisa dipastikan harga jual gas elpiji Pertamina akan lebih murah dari harga jual gas elpiji perusahaan asing yang akan beroperasi di Indonesia.(Adv)

# GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL

